

## WEEKLY REPORT

### MARKET DRIVERS

#### DOMESTIK

- **Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2020 tercatat rendah 1,68% yoy dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1% (4 Januari 2021).** Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga inflasi di kisaran sasarannya 3,0±1% pada 2021. IHK Desember 2020 yang terkendali mendorong capaian inflasi tahun 2020 yang rendah. Secara bulanan, inflasi IHK pada Desember 2020 mencapai 0,45% mom, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,28% mom. Inflasi tersebut lebih rendah dari rerata inflasi Desember lima tahun sebelumnya sebesar 0,67% mom. Berdasarkan komponennya, inflasi inti tercatat 0,05% mom, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,06% mom. Inflasi kelompok *administered prices* terjaga rendah sebesar 0,35% mom, meskipun sesuai pola musiman akhir tahun meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,16% mom. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* tercatat 2,17% mom, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan November 2020 sebesar 1,31% mom, sejalan pola musiman akhir tahun.
- **Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun (96,1% dari target Perpres 72/2020). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tersebut tumbuh negatif sebesar -16,7% (6 Januari 2021).** Penerimaan pajak yang paling terpuak dampak dari pandemi di sisi lain karena pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada UMKM dan dunia usaha yang terimbas pandemi Covid-19. Insentif diberikan dalam bentuk a.l. PPh 21 DTP; Pengurangan PPh ps 25; Restitusi PPN dipercepat; dan PPh final UMKM DTP. Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan & Cukai relatif lebih baik didukung kebijakan tarif cukai dan pengendalian rokok ilegal, sedangkan penerimaan PNBPN ditopang oleh harga komoditas yang membaik di akhir tahun 2020. Sementara itu, realisasi penerimaan hibah mencapai Rp12,3 triliun terutama dipengaruhi oleh hibah dari dalam negeri langsung (Pemerintah Daerah) terkait penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.
- **Realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun (94,6% dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 12,2% dari realisasinya di tahun 2019 (6 Januari 2021).** Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi dengan melakukan peningkatan belanja yang diarahkan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, melindungi masyarakat terdampak, serta pemulihan ekonomi. Dalam realisasi belanja negara di tahun 2020 tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.827,4 triliun (92,5% dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 22,1% dari realisasinya di tahun 2019. Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp762,5 triliun (99,8% dari pagu Perpres 72/2020), lebih rendah 6,2% dari realisasi di tahun 2019. Pencapaian realisasi TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa.

#### **Disclaimer**

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

- **Kinerja APBN sebagai alat countercyclical untuk merespon dampak pandemi sampai dengan akhir tahun cukup terkendali dengan tetap menjaga defisit di bawah target Perpres 72/2020, yaitu sebesar Rp956,3 triliun (6,09% dari PDB) (6 Januari 2021).** Pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI). Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp1.190,9 triliun, utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp1.226,8 triliun. Realisasi penerbitan SBN melalui lelang telah terpenuhi 100%, termasuk total pembelian SBN oleh BI sebagai *stand by buyer* sesuai SKB I sebesar Rp75,86 triliun (SBSN Rp33,78 triliun dan SUN Rp42,07 triliun) serta pembiayaan terkait burden sharing sesuai SKB II juga terpenuhi 100%, yaitu realisasi Public Goods sebesar Rp397,56 triliun dan nonpublic goods sebesar Rp177,03 triliun. Dukungan BI sesuai skema SKB I dan II tersebut akan dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin, di tahun 2020 dan 2021. Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi yang diberikan kepada BUMN, BLU, dan lembaga, serta badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan posisi realisasi defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2020 tersebut, diperkirakan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp234,7 triliun. SiLPA tersebut dapat dipergunakan Pemerintah sebagai fiscal buffer dalam APBN TA 2021, antara lain sebagai salah satu sumber pembiayaan program vaksinasi.
- **Kementerian Keuangan melaporkan realisasi stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 31 Desember 2020 mencapai 83,4% atau setara Rp579,8 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun (6 Januari 2021).** Realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp63,51 triliun atau setara dengan 63,8% dari total anggaran sebesar Rp99,5 triliun. Sedangkan realisasi serapan terbesar yaitu di sektor pembiayaan korporasi yang mencapai 100% serta sektor perlindungan sosial yang sudah tersalurkan sebesar Rp220,39 triliun atau 95,7% dari total anggaran Rp230,21 triliun. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.
- **Bank Indonesia (BI) melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2021 (8 Januari 2021).** PBI ini antara lain memperkuat aturan mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran (*access policy*), penyelenggaraan sistem pembayaran hingga pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran (*exit policy*), fungsi BI di bidang sistem pembayaran, pengelolaan data secara terintegrasi, dan perluasan ruang uji coba inovasi teknologi. Pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran didasarkan pada pendekatan berbasis aktivitas dan risiko sehingga tidak bersifat diberlakukan sama untuk semua (*one size fits all*), khususnya dalam *access policy* dan penyelenggaraan sistem pembayaran serta pengawasan oleh BI. Selain itu, pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran juga mengedepankan *principle-based regulation* dan mendorong optimalisasi penguatan fungsi *Self Regulatory Organization* (SRO).
- **Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 sebesar US\$135,9 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2020 sebesar US\$133,6 miliar (8 Januari 2021).** Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2020 terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerimaan pajak. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh

## Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

## Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.



- **Kementerian PUPR menyebutkan bahwa realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 965.217 unit rumah (8 Januari 2021).** Angka capaian tersebut berasal hasil pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 772.324 unit dan Non MBR sebanyak 192.893 unit rumah. Pembangunan rumah MBR tercatat dari pembangunan rumah swadaya Kementerian PUPR dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan sebanyak 289.983 unit. Selain itu juga pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lain sebanyak 51.136 unit rumah, pemerintah daerah sebanyak 33.925 unit rumah, pengembang perumahan 388.639 unit rumah, CSR perusahaan 3.681 unit dan masyarakat tercatat 4.960 unit rumah. Di sektor pembangunan rumah untuk non-MBR, jumlah pembangunan rumahnya tercatat sebanyak 192.893 unit. Angka tersebut berasal dari pembangunan rumah oleh pengembang sebanyak 178.885 unit dan masyarakat sebanyak 14.038 unit.

## MARKET IMPACTS

- **Dari Indikator Pasar Keuangan Indonesia di Tabel 4, dapat kita lihat bahwa terjadi penguatan kondisi dalam satu minggu terakhir memasuki tahun 2021:**
  - **IHSG menguat sebesar 4,66% pada minggu pertama tahun 2021** yaitu dari 5.979 ke 6.258. Prospek penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah sangat mempengaruhi kinerja pasar saham minggu ini.
  - Pada minggu pertama tahun 2021, **Rupiah terapresiasi sebesar 0,21%**, yaitu dari Rp14.050 per USD menjadi Rp14.020 per USD. Apresiasi rupiah selama satu minggu ini disebabkan antara lain yield SBN 10 tahun naik ke level 6,11%, serta premi CDS Indonesia 5 tahun tetap pada level 67,48.
  - **Yield SBN Rupiah 10 tahun posisinya naik 25bps menjadi 6,11% pada minggu pertama tahun 2021.** Sementara yield SBN USD 10 tahun juga naik 11bps menjadi 2,10% pada minggu pertama tahun 2021.

## Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

## Disclaimer

*Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.*

Tabel 1. Realisasi Sementara APBN s.d 31 Desember 2020

Uraian	APBN 2020 Perpres 72/2020	Realisasi Sementara s.d 31 Desember	% terhadap Perpres 72/2020
<b>A Pendapatan Negara</b>	<b>1699.9</b>	<b>1633.6</b>	<b>96.1%</b>
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>	1404.5	1282.8	91.3%
<b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	294.1	338.5	115.1%
<b>III. Penerimaan Hibah</b>	1.3	12.3	946.2%
<b>B Belanja Negara</b>	<b>2739.2</b>	<b>2589.9</b>	<b>94.5%</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	1975.2	1827.4	92.5%
1. Belanja K/L	836.4	1055.0	126.1%
2. Belanja Non K/L	1138.9	772.3	67.8%
<b>II. Transfer ke daerah dan Dana Desa</b>	763.9	762.5	99.8%
1. Transfer Ke Daerah	692.7	691.4	99.8%
2. Dana Desa	71.2	71.1	99.9%
<b>C Keseimbangan Primer</b>	<b>(700.4)</b>	<b>(642.2)</b>	<b>91.7%</b>
<b>D Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B)</b>	<b>(1 039.2)</b>	<b>(956.3)</b>	<b>92.0%</b>
% Surplus / (Defisit) Anggaran terhadap PDB	<b>(6.34)</b>	<b>(6.09)</b>	
<b>E Pembiayaan Anggaran</b>	<b>1 039.2</b>	<b>1 190.9</b>	<b>114.6%</b>
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Anggaran		234.7	

Sumber : Kemenkeu

Tabel 2. Realisasi Program PEN s.d 31 Desember 2020

Sektor	Jumlah Stimulus (Rp T)	Realisasi (Rp T)	Realisasi (%)
Kesehatan	99.50	63.51	63.8%
Perlindungan Sosial	230.21	220.39	95.7%
Insentif Usaha	120.61	56.12	46.5%
UMKM	116.31	112.44	96.7%
Pembiayaan Korporasi	60.73	60.73	100.0%
Sektoral & Pemda	67.86	66.59	98.1%
<b>Total</b>	<b>695.2</b>	<b>579.8</b>	<b>83.4%</b>

Sumber : Kemenkeu

Tabel 3. Perubahan Beberapa Indikator Pasar

Perubahan Year-to-Date 8 Januari 2021								
Nilai Tukar		Saham		Obligasi Pemerintah 10Y			Komoditi	
				Negara	Yield	Yield Change		
CNY	0,86%	SET	5,15%	Italy	0,53%	-2	Nickel	9,0%
IDR	0,21%	JCI	4,66%	Russia	5,92%	0	Rubber	8,8%
DXY	0,07%	IBOV	2,83%	China	3,14%	0	Natural Gas	8,7%
EUR	0,07%	SHCOMP	2,79%	India	5,88%	1	Brent	5,9%
PHP	-0,10%	MXAPJ	2,66%	Japan	0,03%	2	WTI	5,5%
MYR	-0,27%	NKY	2,53%	Thailand	1,34%	2	Aluminium	2,9%
THB	-0,39%	SENSEX	1,73%	Germany	-0,53%	4	CPO	1,7%
JPY	-0,70%	CCMP	1,39%	USA	1,09%	17	Gold	1,7%
RUB	-0,96%	SPX	1,27%	Indonesia	6,11%	24	Coal	0,7%
BRL	-4,00%	FBMKLCI	-0,29%	Brazil	7,43%	52	Rice	0,0%

Sumber : Bloomberg

## Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

## Disclaimer

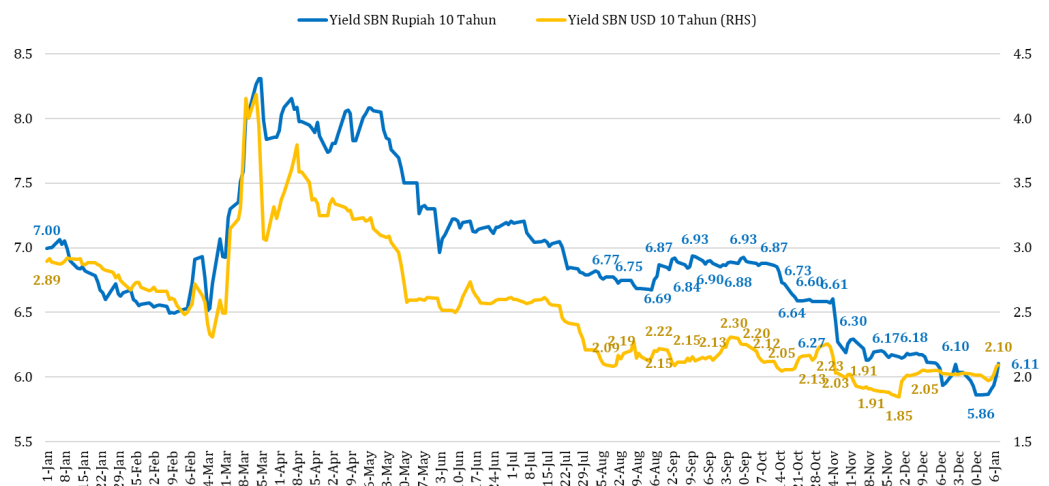
Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan  
internal. PT. Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk  
karyawan tidak bertanggung jawab atas  
akurasi dan kelengkapan data dari sumber  
data yang digunakan. Opini dalam Analisa  
merupakan pendapat pribadi analis dan tidak  
mewakili perusahaan.

Tabel 4. Indikator Pasar Keuangan Indonesia Menguat Pada Minggu Pertama 2021

	08-Jan-21	30-Dec-20	Dec 20 - 8 Jan (ytd)
IHSG	6.258	5.979	4,66%
Rupiah	14.020	14.050	0,21%
10Y Rupiah bond yield	6,11	5,86	24 bps
10Y USD bond yield	2,10	1,99	11 bps
CDS Indo 5Y	67,48	67,69	0 bps

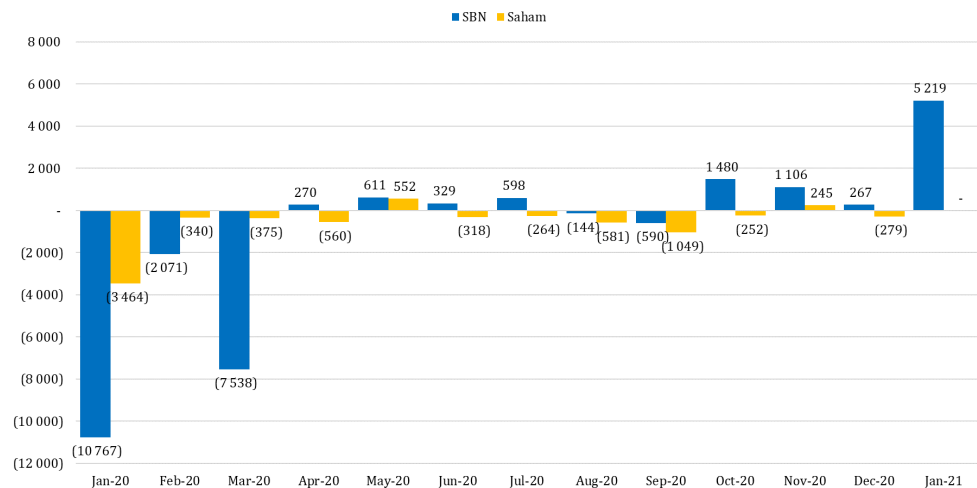
Sumber : Bloomberg

Grafik 1. Perkembangan Yield SBN Rupiah dan Valas 10 Tahun (%)



Sumber : Bloomberg

Grafik 2. Net Buy/Sell Investor Asing di SBN dan Saham (USD juta) s.d 8 Januari 2021



Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**

Chief Economist

Investor Relations & Research Division

PT Bank Tabungan Negara

(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16

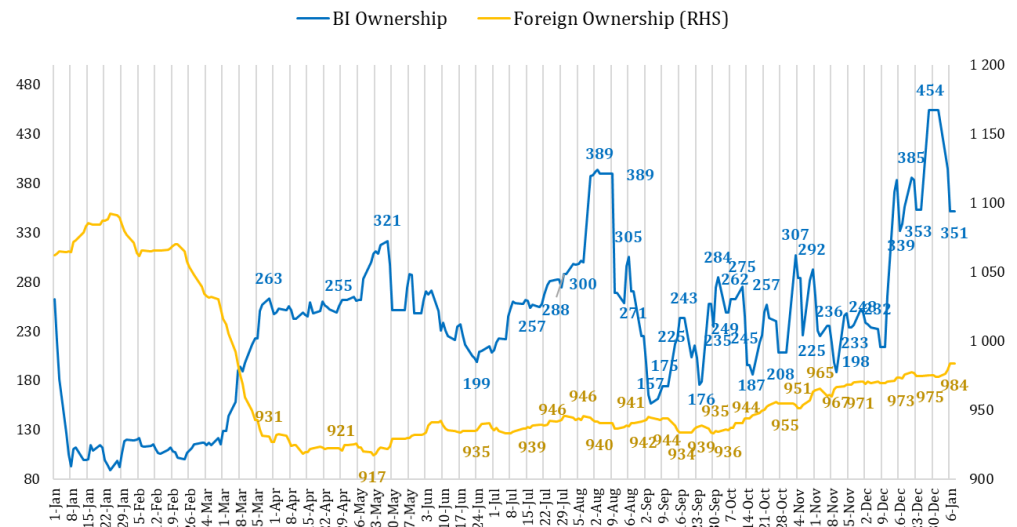
Jl. Gajah Mada No. 1,

Jakarta 10130

**Disclaimer**

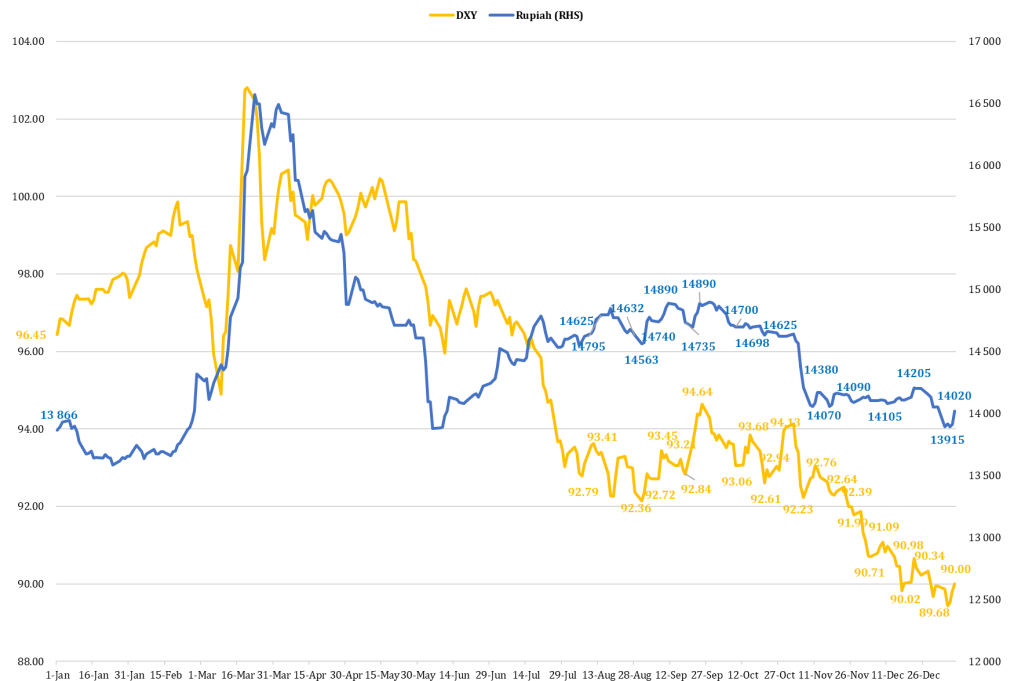
Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

**Grafik 3. Kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan Investor Asing (Rp triliun)**



Sumber : Bloomberg

**Grafik 4. Rupiah turut menguat di tengah penguatan DXY**



Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.